



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Sidang : I
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Rabu, 6 September 2017
Sifat : Terbuka
Pukul : 09.45 WIB s.d 12.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI.
Acara : Membahas RKA/KL Kementerian Perhubungan dalam nota
Keuangan RAPBN TA 2018
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos, MSi
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 09.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah membahas RKA/KL Kementerian Perhubungan dalam nota Keuangan RAPBN TA 2018.
3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	KEMENTERIAN/PROGRAM/UNIT KERJA	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2018	KEKURANGAN
	Kementerian Perhubungan	102.061.300.655	48.187.626.957	(53.873.673.698)
1.	Sekretariat Jenderal (Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan)	887.031.193	580.135.964	(306.895.229)
2.	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan)	102.912.757	106.110.822	3.198.065
3.	Ditjen Perhubungan Darat (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Darat)	13.816.864.996	4.582.007.686	(9.234.857.310)
4.	Ditjen Perhubungan Laut (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Laut)	16.199.646.213	11.600.486.955	(4.599.159.258)
5.	Ditjen Perhubungan Udara (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Udara)	18.978.031.081	9.146.557.582	(9.831.473.499)
6.	Ditjen Perkeretaapian (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perkeretaapian)	45.804.109.928	17.296.256.780	(28.507.853.148)
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan)	5.528.975.652	4.527.496.007	(1.001.479.645)
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan (Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Perhubungan)	235.786.825	143.830.906	(91.955.919)
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek)	507.942.011	204.744.255	(303.197.756)

2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten/kota tertentu, akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

MENTERI PERHUBUNGAN,


BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 6 September 2017

KETUA RAPAT,


LASARUS